

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini memberikan informasi tentang pencapai kinerja dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Dalam Kurun Waktu Tahun 2022, namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentu akan menjadi motivasi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan pembangunan yang lebih terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana untuk tahun mendatang.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini, semoga LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat menjadi acuan yang dapat memberikan arah pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selanjutnya.

Rumbia, Januari 2023



Drs.H.ABDUL AZIS,M.Si
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19651231 199401 1 009

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATAPENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Tujuan | 2 |
| 1.4 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... | 3 |
| 1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| 1.4.2 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.5 Aspek strategis..... | 6 |
| 1.6 Isu Strategis | 7 |
| 1.7 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada..... | 11 |
| 1.8 Sistematika Penyajian | 12 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 17 |
| 2.1 VISI | 17 |
| 2.2 MISI | 18 |
| 2.3 Tujuan | 19 |
| 2.4 Sasaran | 19 |
| 2.5 Sasaran Strategis | 20 |
| 2.6 Strategi dan Kebijakan | 20 |
| 2.7 Indikator Kinerja Utama | 21 |
| 2.8 Program dan Kegiatan | 22 |
| 2.9 Perjanjian Kinerja..... | 24 |
| BAB III AKUNTABILITASKINERJA | 25 |
| 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA | 25 |
| 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 26 |
| 3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 | 26 |
| 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya | 28 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| | |
|--|----|
| 3.2.3 Capaian Program dan Kegiatan | 29 |
| 3.2.4 Realisasi Anggaran | 36 |
| a. Capaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022 | 36 |
| b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Terhadap Capaian Kinerja | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dianggarkan melalui APBD- APBDP tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja)

dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana 2017 s/d 2022.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2022 disusun dengan landasan hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.3. Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana selama tahun 2022.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana mempunyai tugas : membantu Bupati Bombana dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
6. Pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

1.4.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan mempertimbangan kondisi wilayah dan kebutuhan organisasi, sehingga susunan organisasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Sekretariat

a). Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

b). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c). Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian tata Usaha.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

a). Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

b). Bidang Pengendalian di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Pengendalian terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Keluarga Berencana

a). Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana daerah Kabupaten

b). Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c). Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

a). Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

b). Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c). Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

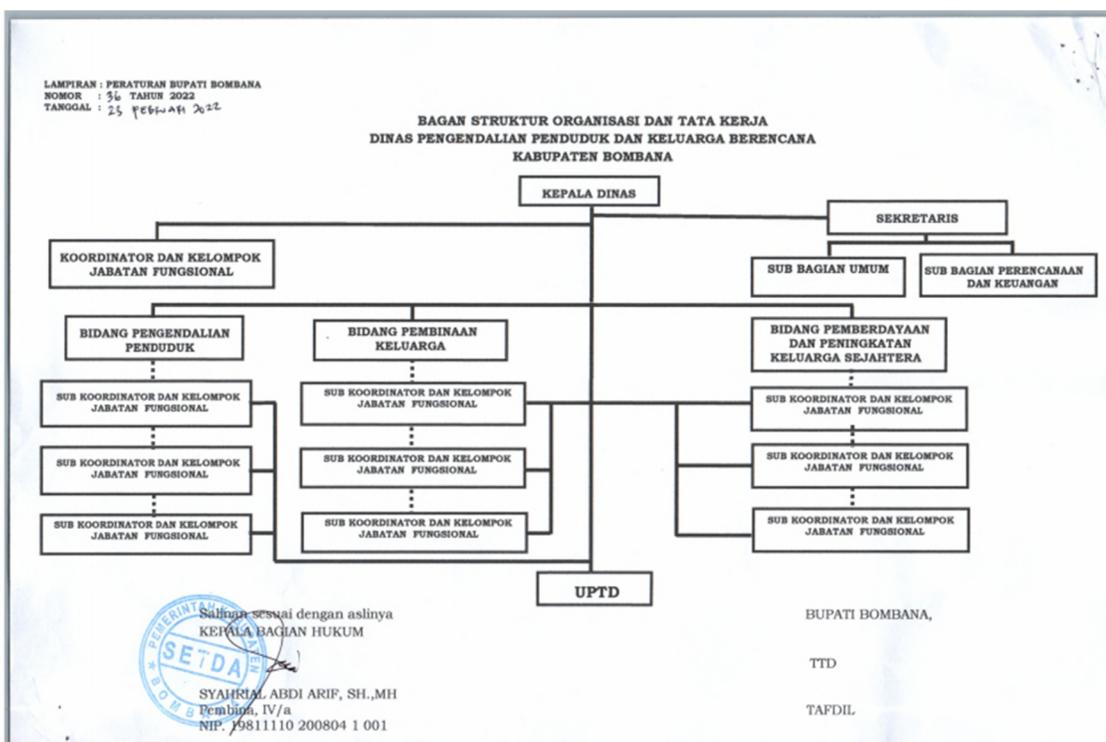
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a). UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di

lapangan, unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- b). UPTD dilengkapi dengan tata usaha dan jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016. Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bombana nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Balai Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

Tabel 1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana



1.5. Aspek Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki aspek strategis yaitu pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana telah berhasil menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bombana melalui pembentukan Kampung Keluarga Berencana, sehingga dengan keberadaan kampung KB di setiap kecamatan diharapkan akan memudahkan keterjangkauan informasi dan

pelayanan kepada masyarakat kedepannya. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon Program Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dalam mengendalikan dan mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu dengan terus memberdayakan Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga Pemberdayaan masyarakat.
 - b) Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah
 - c) Meningkatkan kapasitas SDM OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) KB.
 - d) Meningkatkan koordinasi ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
 - e) Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana

1.6. Isu Strategis

Visi pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2017-2022”**. Dan untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi atau agenda utama pembangunan Kabupaten Bombana, yaitu:

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana

Penjabaran dari misi diatas adalah :

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah. Agenda percepatan pembangunan infrastruktur dimaksud meliputi:

- Pembangunan infrastruktur tingkat wilayah Kabupaten Bombana
- Pembangunan infrasutruktur pedesaan

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi

Dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi

Dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/ kelautan sebagai andalan Utama.

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana

Dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya Lokal.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Bombana yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Bombana sejahtera (Munajah) 2017 - 2022. Hasil dari pengidentifikasian terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Olehnya itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana yang terlihat pada table berikut ini :

Tabel. 2
Faktor Penghambat dan Pendorong OPD terhadap Visi, Misi dan Pencapaian Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| VISI | MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022 | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|-----------|
| | NO | MISI & PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI | | PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD | FAKTOR | |
| | | | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| | 4 | Misi 2 Melanjutkan Reformasi Birokrasi | a. Sarana/Prasarana penunjang operasional belum memadai | Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan | a. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten | |
| | | Program a. Program | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|---|--|---|
| | | <p>peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> | <p>b. Masih kurangnya jumlah personil yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>c. Masih adanya beberapa formasi jabatan struktural yang belum terisi</p> | <p>keperintahan</p> | <p>Bombana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana</p> <p>b. Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil</p> |
| Misi 4 | Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | <p>a. Masih tingginya angka kebutuhan berKB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)</p> <p>b. Perlu penambahan tenaga fungsional Petugas Lapangan KB</p> <p>c. Perlu peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tri Bina</p> <p>d. Perlu peningkatan pembinaan kesertaan ber KB di masyarakat</p> | <p>a. PUS yg baru punya anak satu ingin segera punya anak</p> <p>b. Persepsi masyarakat bahwa KB adalah urusan ibu-ibu</p> <p>c. Belum semua keluarga mengikuti kegiatan BKB, BKR dan BKL</p> <p>d. Tidak ada penerimaan PNS formasi Penyuluh KB</p> | <p>a. Adanya peran stakeholder dalam pengelolaan KB</p> <p>b. Kemudahan mendapatkan akses informasi tentang KB yang benar.</p> <p>c. Adanya peran institusi masyarakat seperti PPKBD dan Sub PPKBD</p> <p>d. Tersedianya kegiatan BKB, BKR dan BKL</p> <p>e. Tersedianya tempat pelayanan dengan jenis alkon yg lengkap</p> <p>f. Tersedianya anggaran untuk pendataan keluarga</p> |
| Program | <p>a. Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>b. Program Pengendalian Penduduk</p> <p>c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</p> | | | | |

Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Bombana, maka isu-isu strategis pembangunan meliputi:

1. Peningkatan Sarana/Prasarana penunjang operasional belum memadai.

Sarana prasarana penunjang operasional, harus ditingkatkan pembangunan dan pemeliharannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama di tingkat lapangan. Sarana prasarana yang telah tersedia sebelumnya akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

2. Masih kurangnya jumlah personil yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama tenaga Penyuluh KB di lapangan

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel, selain itu dalam upaya memenuhi pelayanan yang prima kepada masyarakat maka dibutuhkan personil yang tersedia dan tersebar di tingkat lapangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan yang dibutuhkan khususnya pelayanan terkait program keluarga berencana .

3. Masih tingginya angka kebutuhan berKB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)
4. Kurangnya Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraception Prevalensi Rate/CPR)
5. Masih kurangnya pemahaman tentang mamfaat ber-KB
6. Perlu peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tri Bina

1.7. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut

Tabel. 3
Keadaan Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan :

| No | Eselon | Jumlah | Ket |
|----|----------------------------|--------|----------------------|
| 1. | II/b | 1 | Kepala Dinas |
| 2. | III/a | 1 | Sekretaris Dinas |
| 3. | III/b | 3 | Kepala Bidang |
| 4. | IV/a | 24 | Kasubag,Ka.UPTD |
| 4. | IV/b | 8 | KTU UPTD (14 Kosong) |
| 5. | Jabatan Fungsional | 8 | Sub Koordinator |
| 6. | Tenaga Administrasi | 9 | ASN Staf |
| 7. | Tenaga Pendukung | 12 | Non ASN |
| 8. | Tenaga Penyuluh KB | 20 | ASN Pusat |
| 9. | Tenaga Petugas Lapangan KB | 128 | Non ASN |

Tabel. 4
Keadaan Berdasarkan Golongan / Ruang :

| NO | Gol / ruang | Jumlah | Ket |
|----|-------------|--------|-----|
| 1 | IV/e | - | - |
| 2. | IV/d | - | - |
| 3. | IV/c | 1 | - |
| 4. | IV/b | 1 | - |

| | | | |
|-----|---------------------|-----------|----------|
| 5. | IV/a | 2 | - |
| | Jumlah | 4 | - |
| 6. | III/d | 21 | - |
| 7. | III/c | 19 | - |
| 8. | III/b | 6 | - |
| 9. | III/a | 3 | - |
| | Jumlah | 49 | - |
| 10. | II/d | 1 | - |
| 11. | II/c | - | - |
| 12. | II/b | 1 | - |
| 13. | II/a | - | - |
| | Jumlah | 2 | - |
| 14. | I/d | - | - |
| 15. | I/c | - | - |
| 16. | I/b | - | - |
| 17. | I/a | - | - |
| | Jumlah | - | - |
| | Jumlah Total | 55 | - |

Tabel. 5
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Pegawai | |
|----|---------------------|-----------------|------------------|
| | | PNS | Tenaga Honorer |
| 1 | SD | - | - |
| 2 | SLTP | - | - |
| 3 | SLTA | 2 Orang | 47 Orang |
| 4 | Diploma 2 | - Orang | 4 Orang |
| 5 | Diploma 3 / Akademi | 11 Orang | 40 Orang |
| 6 | Strata 1 (S1)/DIV | 28 Orang | 48 Orang |
| 7 | Strata 2 (S2) | 14 Orang | 1 Orang |
| 8 | Strata 3 (S3) | - | - |
| | J u m l a h | 55 Orang | 140 Orang |

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antar target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis nasional
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja tahun 2022 (terlampir).
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup,

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih tahun 2017, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Bombana periode tahun 2017-2022 adalah :

“ MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022”

Visi Pembangunan Kabupaten Bombana ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Bombana dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam mewujudkan Bombana masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.1 : Tabel Uraian Unsur Visi Kepala Daerah Tahun 2017 - 2022

| UNSUR VISI | PENJELASAN |
|-------------|--|
| Religius | Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial) |
| Berkeadilan | Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata. |
| Aman | Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi. |
| Sejahtera | terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. |
| Berbudaya | menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamis, nilai kejujuran, etika sosial bermasyarakat yang |

| UNSUR VISI | PENJELASAN |
|------------|---|
| | menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal. |

2.2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk mewujudkan unsur misi :

1. Pernyataan Misi ke 2 yaitu Melanjutkan Reformasi Birokrasi

Dalam misi tersebut diatas diharapkan terciptanya kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

Sesuai dengan misi ke 2 tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan data-data dan penyusunan laporan, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jugsan masuk pada penjabaran Misi 4 yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini adalah meningkatnya angka harapan hidup melalui pengendalian kependudukan

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Sasaran yang tertuang di dalam dokumen RPJMD serta potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait tujuan dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel

Sedangkan indikator sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.2 : Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|--|----------------------------------|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | % | 80.86% | 82.77% | 83.18% | 84,56% | 85.88% |
| 2 | Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Peningkatan Nilai Predikat SAKIP | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | Nilai | CC | BB | BB | A | A |

2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana adalah :

- a. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan
- b. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel

Tabel II.3 : Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

| Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | 85,88% |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | A |

2.6. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana seperti pada tabel berikut :

Tabel II.4 : Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

| Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) 2017-2022 | | |
|---|---|---|
| Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi | | |
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah | Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah |
| Misi 4 : Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | |
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Cakupan Peserta KB (PB) Baru maupun Aktif (PA) per Mix Kontrasepsi Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga melalui pengendalian dan pengaturan kelahiran bagi Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 sd 49 Tahun | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepesertaan ber-KB Menurunkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui BKB,BKL dan BKR Meningkatkan dukungan dan kebijakan terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Menyediakan parameter kependudukan melalui pendataan dan validasi berkelanjutan |

2.7. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan, indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | FORMULASI INDIKATOR |
|---|---------------------|--|-------------------|--------|--|
| Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | Meningkatnya upaya pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | % | $\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$ |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------|-------------|
| Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Peningkatan Nilai Predikat SAKIP | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | Nilai | Nilai SAKIP |
|--|----------------------------------|---|--|-------|-------------|

2.8. Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 dari Dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 13.514.884,814,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 11,315,030,714,- dan belanja modal sebesar Rp. 2,199,854,100,- dengan program dan kegiatan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel II.6 : Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|--|---|---|---|----------------|
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60.828.900 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19.834.800 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 28.000.000 |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.513.027.814 |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 133.798.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16.200.000 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 66.000.000 |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 21.000.000 |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 65.100.000 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12.688.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.200.000 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.000.000 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 795.726.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 54.000.000 |
| Pengadaan Mebel | 57.500.000 | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.000.000 | | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 2.354.100 | | | |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|----|---|---|--|----------------|
| | | Pemerintah Daerah | atau Bangunan Lainnya | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.600.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 21.000.000 |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.500.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 217.200.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 28.250.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 |
| B | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 122.039.400 |
| C | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 136.800.000 |
| | | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 90.900.000 |
| | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 991.200.000 |
| | | Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 1.492.571.000 |
| | | | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 114.729.000 |
| | | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 786.415.000 |
| | | Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 10.350.000 |
| | | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 70.000.000 |
| | | | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 440.262.000 |
| | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 237.060.800 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 862.500.000 |
| | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 33.790.000 |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|--|--|--|---|-----------------------|
| | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | |
| C | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 603.000.000 |
| Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | 1.077.060.000 | |
| Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | 114.400.000 | |
| TOTAL | | | | 13.514.884.814 |

2.9. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja ini memuat rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 yang mendapat dukungan pembiayaan dari APBD. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Mempertimbangkan sumberdaya, telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.7 : Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

ESELON II

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | 85,8% |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | A |

| Program | | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Ket |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.166.919.200 | 6.535.246.800 | APBD |
| 2. | Program Pengendalian Penduduk | 138.912.000 | 122.039.400 | APBD |
| 3. | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 5.204.827.800 | 5.266.577.800 | APBD |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 1.911.860.000 | 1.794.460.000 | APBD |

Untuk mewujudkan sasaran dan target tingkat Eselon II (Kepala Dinas) maka seluruh eselon III dan IV juga telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2022 sebagaimana terlampir pada lampiran dokumen LAKIP ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana. Dalam tahun anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|--|--------|---------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | 85,88% | 71,85% | 83,66% |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | A | *BB | 71,01% |

Catatan : Bertanda bintang merupakan Nilai SAKIP pada tahun n-1 (2021)

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2022 adalah belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|---|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan |
|----------------------------|---|

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % Capaian |
|-----|--|-------------------|--------|---------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | 85,88% | 71,85% | 83,66% |

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2022 belum tercapai dengan baik.

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Pembinaan Keluarga Berencana (sebanyak 4 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan), Program Pengendalian Penduduk (sebanyak 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (sebanyak 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan).

Persentase Rasio Akseptor KB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Rasio Akseptor KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 85,88% realisasi 71,85% atau 83,66% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 18.312 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 24.141, sedangkan pada tahun 2021 tercapai 96,96 % (Sumber:www.intipkonsepdata.com), target nasional untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 62,54 % sesuai Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 (tambahkan target nasional), sedangkan target dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada Renstra Tahun 2020-2024 yaitu 56,32%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2022 yaitu bulan april telah dilakukan validasi terhadap hasil Pendataan Keluarga (PK 21) secara nasional sehingga didapatkan validasi data secara *up date*.
2. Adanya rapat bulanan UPTD sebagai evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan.
3. Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh beberapa sasaran program yang ada di bidang Keluarga Berencana, bidang Keluarga Sejahtera, bidang Pengendalian Penduduk yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Realisasi Kinerja Sasaran Bidang-bidang Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket |
|----|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1. | Terwujudnya Advokasi kependudukan kepada stakeholder terkait dan efektifnya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100% | 86,97% | 86,97% | Bidang KB |
| | Terwujudnya SDM Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang unggul dan siap pakai | Jumlah Tenaga PKB/PLKB yang ber daya guna | 153 Orang | 141 Orang | 92,15% | |
| | Terwujudnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kab.Bombana secara optimal,efektif dan efisien | Tersedianya Sarpras penunjang Pelayanan serta Alat dan Obat Kontrasepsi di kabupaten Bombana yang memadai,terjangkau dan berkesinambungan | 23 Faskes | 23 Faskes | 100 | |
| | Terwujudnya keikutsertaan Organisasi Kemasyarakatan di kab.Bombana dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah POKJA di Kampung KB yang aktif | 50 KKB | 50 KKB | 100% | |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket |
|----|---|--|--------|-----------|----------|---------------|
| 2. | Tersedianya Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten Bombana di | Jumlah dokumen data mikro keluarga yang tersedia | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Bidang Dalduk |
| | | Tercapainya Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | 3,00 | 2,52 | 116,67 % | |
| 3. | Terwujudnya Keluarga yang Sejahtera | Persentase POKTAN Tribina,PIK-R dan UPPKS yang aktif | 80% | 66,43% | 83,03% % | Bidang KS |

| | |
|----------------------------|--|
| Sasaran Strategis 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel |
|----------------------------|--|

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|--|--------|---------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah | A | *BB | 71,01% |

Catatan : Bertanda bintang merupakan Nilai SAKIP pada tahun n-1 (2020)

Pencapaian Indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori "A". Untuk Penilaian SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bombana tahun 2022 dijadwalkan pada tahun 2022, dan pada saat dokumen ini disusun belum ada Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah, sehingga capaian yang disajikan pada tabel diatas adalah capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2021).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perlu dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pelaksanaan RPJMD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memasuki tahun ketiga dari target 5 Tahunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022, dimana pada tahun kedua (2019) telah dilakukan Revisi RPJMD yang kemudian dilakukan Revisi Renstra oleh masing-masing OPD, sehingga target maupun sasaran pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana berubah dan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Capaian Kinerja |
|----|---|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (9/6) |
| 1. | Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan | Rasio Akseptor KB | 84,56 % | 81,99% | 96,96% | 85,88 % | 71,85% | 83,66% | 87,63% |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektora t Daerah | A | *BB | 71,44% | A | *BB | 71,04% | 99,44% |

Catatan : Bertanda bintang merupakan Nilai SAKIP pada tahun n-1 (2021)

Memasuki tahun kelima Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, pencapaian persentase Rasio Akseptor KB pada tahun 2022 adalah sebesar 71,85% atau 83,66% dari target Renstra 2017-2022 sebesar 85,88%. Pencapaian kinerja tersebut belum tercapai dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Meningkatnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dimana Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2022 PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan PUS yang Ingin Anak Tunda (IAT) pada umumnya tidak menggunakan kontrasepsi
2. Terjadinya focussing anggaran dan kegiatan terhadap isu strategis percepatan penurunan stunting
3. Belum terpenuhinya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berstatus ASN di setiap desa/kelurahan

3. Capaian Program dan Kegiatan

Secara umum kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bombana pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai secara maksimal, hal ini dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan di bawah ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel III.4 Capaian Realisasi Program / Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|---------------------|--|-------------------|--------|-----------|--------|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| I | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Angka harapan Hidup | Meningkatnya upaya pengendalian kependudukan | Rasio Aseptor KB | 85,88% | 71,85% | 83,66% | Program Pengendalian Penduduk | | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga | 3,00 Orang | 2,52 Orang | 116,67 % |
| | | | | | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah dokumen data keluarga yang tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | | | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | | Persentase Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 7,09 % | 17,02% | 41,21% |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah media KIE yang Tersedia | 22 Paket | 1 Paket | 4,54% |
| | | | | | | | | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah kegiatan momentum (event) yang diikuti untuk penyeberluasan informasi KB | 1 Event | 1 Event | 100 |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Persentase Balai Penyuluh KB yang rutin melaksanakan penyuluhan | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| | | | | | | | | Pendayagunaan | Penyediaan | Jumlah Gedung Balai | 2 Gedung | 2 Gedung | 100 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|--|---|---|--|--------------|------------|--------|
| | | | | | | | | Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Penyuluh KB yang dibangun | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Roda 2 yang tersedia. | | 10 Unit | 10 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | | Jumlah sarana Prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga yang tersedia | | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | | | | | | | | | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah PKB/PLKB yang terlatih di tiap Kecamatan | 153 Orang | 143 Orang | 93,46% |
| | | | | | | | | | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melakukan pembinaan program KB | 622 Orang | 515 Orang | 82,79% |
| | | | | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapat distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi | 23 Fasilitas | 23 Fasilitas | 100 | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Aplikasi berbasis Android yang tersedia dan dikembangkan. | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|---|---|--|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | Jumlah side efek kontrasepsi yang tersedia | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 |
| | | | | | | | | | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Petugas Lapangan KB yang memberikan konseling KB | 145 Orang | 143 Orang | 98,62% |
| | | | | | | | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Akseptor KB yang Terlayani | 3255 Aseptor | 3255 Aseptor | 100 |
| | | | | | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang malakukan integrasi Pembangunan antar sektor | 50 Kampung | 50 Kampung | 100 |
| | | | | | | | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang mengikuti lomba PKK KB Kesehatan tingkat provinsi | 1 Kampung | 1 Kampung | 100 |
| | | | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | | Persentase POKTAN Tribina,PIK-R dan UPPKS yang aktif | 80 Persen | 66,43 Persen | 83,03% |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan | Jumlah POKTAN yang aktif melaksanakan kegiatan | 143 Kelompok | 95 Kelompok | 66,43% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|--|--|---|------------|------------|------|
| | | | | | | | | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | |
| | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| | | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 110% |
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| | | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|--|---|--|---------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/ Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli | 60 Pakaian | 60 Pakaian | 100% |
| | | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang di adakan | 1770 Buah | 1770 Buah | 100% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 7560 Lembar | 7560 Lembar | 100% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku/surat kabar yang dibeli | 48 Eksampelar | 48 Eksampelar | 100% |
| | | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 240 Paket | 240 Paket | 100% |
| | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi | 178 Kegiatan | 178 Kegiatan | 100% |
| | | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim | 8 Surat | 8 Surat | 100% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|---|---|--|------------|------------|------|
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah dan jenis jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air yang dibayar | 36 Tagihan | 36 Tagihan | 100% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Non-ASN (Sopir) yang terbayar jasanya | 2 Orang | 2 Orang | 100% |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi | | 29 Unit | 29 Unit | 100% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jenis dan jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dibayarkan pajaknya yang dipelihara/diperbaiki/diservice | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jenis dan jumlah kendaraan operasional lapangan yang dibayarkan pajaknya dan dipelihara/diperbaiki/di servis | 45 Unit | 45 Unit | 100% |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jenis dan jumlah peralatan dan bahan pembersih yang dibeli. | 640 Buah | 640 Buah | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara. | 750 Lokasi | 750 Lokasi | 100% |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------|-----------|---|------------------|--|---|----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | Jumlah SDM Petugas Kebersihan yang dikontrak/dipekerjakan | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| | | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara/diperbaiki | 10 Jenis | 10 Jenis | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah ASN yang terbayar jasanya atas pemeliharaan aset kantor aparatur | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis | 2 | 2 | 0% |

4. Realisasi Anggaran

a. Capaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 13.718.324.000,- adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022

| No | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| A) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 1.818.779.800 | 1.805.883.148 | 99,29 |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60.828.900 | 60.822.900 | 99,99 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19.834.800 | 19.834.800 | 100 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 28.000.000 | 27.976.000 | 99,91 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 133.798.000 | 133.798.000 | 100 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 16.200.000 | 16.200.000 | 100 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 66.000.000 | 65.945.000 | 99,92 |
| 4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000 | 18.396.300 | 91,98 |
| 5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 65.100.000 | 65.100.000 | 100 |
| | | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.688.000 | 12.688.000 | 100 |
| | | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.200.000 | 6.150.000 | 99,19 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | 23.000.000 | 23.000.000 | 100 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 795.726.000 | 791.417.200 | 99,46 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 54.000.000 | 51.000.000 | 94,44 |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan Pengadaan Mebel | 57.500.000 | 57.380.000 | 99,79 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.000.000 | 86.635.000 | 97,34 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.354.100 | 2.040.000 | 86,66 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| | | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.600.000 | 35.685.103 | 97,50 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.500.000 | 28.499.889 | 100 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 217.200.000 | 217.157.069 | 99,98 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 28.250.000 | 28.249.076 | 100 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 14.908.811 | 99,39 |
| B) | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | 122.039.400 | 116.975.450 | 95,85 |
| 1 | Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 122.039.400 | 116.975.450 | 95,85 |
| C) | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | 5.266.577.800 | 4.939.310.697 | 93,79 |
| 1 | Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 136.800.000 | 62.178.900 | 45,45 |
| | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 90.900.000 | 90.900.000 | 100 |
| | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 991.200.000 | 961.448.768 | 97,00 |
| 2 | Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 1.492.571.000 | 1.384.822.000 | 92,73 |
| | | Penguatan Pelaksanaan | 114.729.000 | 114.728.600 | 100 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Lapangan KB (PKB/PLKB) | Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | |
| | | Sub. Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 786.415.000 | 706.855.000 | 89,88 |
| 3 | Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 10.350.000 | 10.350.000 | 100 |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 70.000.000 | 69.785.291 | 99,69 |
| | | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 440.262.000 | 435.012.000 | 98,81 |
| | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 237.060.800 | 235.893.138 | 99,51 |
| 4 | Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 862.500.000 | 834.065.000 | 96,70 |
| | | Sub. Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB | 33.790.000 | 33.272.000 | 98,47 |
| D) | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | 1.794.460.000 | 772.533.000 | 43,05 |
| 1 | Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS) | 603.000.000 | 572.000.000 | 94,86 |
| | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS) | 1.077.060.000 | 87.470.000 | 8,12 |
| | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS) | 114.400.000 | 113.063.000 | 98,83 |
| BELANJA OPERASI | | | 11.518.469.900 | 10.067.390.633 | 87,40 |
| BELANJA MODAL | | | 2.199.854.100 | 2.058.306.000 | 93,57 |

Realisasi anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bombana sebesar Rp. 12.125.696.633,- atau 88.39% dari total anggaran sebesar Rp. 13.718.324.000,- , terdiri dari Belanja Operasi Realisasi sebesar Rp. 10.067.390.633,- atau 87.40% dari total anggaran sebesar Rp. 11.518.469.900,- dan Belanja Modal Realisasi sebesar Rp. 2.058.306.000,- atau 93.57% dari total anggaran sebesar Rp. 2.199.854.100,-

Di lihat dari tabel di atas alokasi dana untuk belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 60.828.900,- realisasi sebesar Rp. 60.822.900,- atau 99,99%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembelian Alat Tulis Kantor , Kertas dan Cover ,Bahan Komputer dan Pembayaran Jasa Lembur.
2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 19.834.800,- realisasi sebesar Rp. 19.834.800,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembelian Alat Tulis Kantor , Kertas dan Cover ,Bahan Komputer,Pembayaran Jasa Lembur dan Pembayaran Perjalanan Dinas.
3. Sub. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- realisasi sebesar Rp. 27.976.000,- atau 99,91%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembelian Alat Tulis Kantor , Kertas dan Cover ,Bahan Komputer,Pembayaran Jasa Lembur dan Pembayaran Perjalanan Dinas.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp. 133.798.000,- realisasi sebesar Rp. 133.798.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Pembelian Alat Tulis Kantor , Kertas dan Cover ,Bahan Komputer.

2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- realisasi sebesar Rp. 16.200.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian alat tulis kantor, Pembayaran Lembur dan Makan Minum Lembur.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
anggaran sebesar Rp. 66.000.000,- realisasi sebesar Rp. 65.945.000,- atau 99.92%. Pada tahun 2022
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
sebesar Rp. 21.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti pembelian Pakaian Olah Raga.
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 18.396.300,- atau 91.98%. Pada tahun 2022
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
anggaran sebesar Rp. 65.100.000,- realisasi sebesar Rp. 65.100.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembelian Alat Tulis Kantor, Kertas Dan Cover dan Bahan Komputer.
 2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
anggaran sebesar Rp. 12.688.000,- realisasi sebesar Rp. 12.688.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Penggandaan kantor dinas maupun UPTD dan Bahan Cetak Kantor.
 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- realisasi sebesar Rp. 6.200.000,- atau 99,19%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti pembayaran Langganan Jurnal, Surat Kabar atau Majalah.
 4. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.000.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang

dilaksanakan seperti Pembelian Makan Minum Rapat Pegawai Kantor Dinas maupun UPTD dan Makan Minum Jamuan Tamu.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp. 795.726.000,- realisasi sebesar Rp. 791.417.200,- atau 99,46%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- realisasi sebesar Rp. 51.000.000,- atau 99,46%. Pada tahun 2022

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Pengadaan Mebel
anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%. Pada tahun 2022
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
anggaran sebesar Rp. 36.600.000,- realisasi sebesar Rp. 35.685.103,- atau 97,50%. Pada tahun 2022
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau 100%. Pada tahun 2022

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
anggaran sebesar Rp. 28.500.000,- realisasi sebesar Rp. 28.499.889,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti membiayai pembelian BBM mobil Dinas dan operasional kantor, penggantian suku cadang dan biaya servis kendaraan dinas dan operasional lapangan.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
anggaran sebesar Rp. 217.200.000,- realisasi sebesar Rp. 217.157.000,- atau 99,98%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan membiayai pembelian BBM mobil Dinas dan operasional kantor, penggantian suku cadang dan biaya servis kendaraan dinas dan operasional lapangan

3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
anggaran sebesar Rp. 28.250.000,- realisasi sebesar Rp. 28.249.076.,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
4. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.908.811.,- atau 99.39%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu membiayai Pengelolaan BMD dan Pemeliharaan peralatan mesin generation set, alat pendingin dan personal computer.

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

a. Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan

anggaran sebesar Rp. 122.039.400,- realisasi sebesar Rp. 116.975.450.,- atau 95.85%. Pada tahun 2022

C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

1. Sub. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
anggaran sebesar Rp. 136.800.000 ,- realisasi sebesar Rp. 62.178.900 ,- atau 45,45%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian atk,kertas,bahan computer, makan minum,sewa gedung pertemuan dan transport perjalanan dinas dalam kota.
2. Sub. Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
anggaran sebesar Rp. 90.900.000,- realisasi sebesar Rp. 90.900.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian kertas,bahan cetak,makan minum aktifitas lapangan, sewa perlatan mesin dan alat bantu lainnya, dan permbayaran perjalanan dinas dalam kota.
3. Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

anggaran sebesar Rp. 991.200.000,- realisasi sebesar Rp. 961.448.768,- atau 97,00%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti pembelian makan minum rapat, pembayaran jasa honorarium narasumber, pembayaran tagihan listrik, perjalanan dinas.

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

anggaran sebesar Rp. 1.492.571.000,- realisasi sebesar Rp. 1.384.822.000,- atau 92,73%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti pembelian atk, jasa kantor, jasa konsultasi, perjalanan dinas dan pembangunan gedung kantor.

2. Sub. Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

anggaran sebesar Rp. 114.729.000,- realisasi sebesar Rp. 114.728.600,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian atk, pembayaran jasa honor narasumber, sewa gedung dan perjalanan dinas dalam kota.

3. Sub. Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

anggaran sebesar Rp. 786.415.000,- realisasi sebesar Rp. 706.855.000,- atau 89,88%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran perjalanan dinas dalam kota.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub. Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

anggaran sebesar Rp. 10.350.000,- realisasi sebesar Rp. 10.350.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian BBM, makan minum aktifitas lapangan, jasa paket pengirim dan perjalanan dinas dalam kota.

2. Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- realisasi sebesar Rp. 69.785.291,- atau 99,69%. Pada tahun 2022 kegiatan yang

dilaksanakan yaitu pembelian obat-obatan, modal pembangunan gedung, mebel, dan modal software.

3. Sub. Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

anggaran sebesar Rp. 440.262.000,- realisasi sebesar Rp. 435.012.000,- atau 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian ATK, kertas, makan minum, dan pembayaran jasa administrasi .

4. Sub. Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- anggaran sebesar Rp. 237.060.800,- realisasi sebesar Rp. 235.893.138,- atau 99,51%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti Membiayai jasa pelayanan kesehatan, makan minum, perjalanan dinas dan jasa diberikan kepada masyarakat.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1. Sub. Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

anggaran sebesar Rp. 862.500.000,- realisasi sebesar Rp. 834.065.000,- atau 96,70%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja makan minum, jasa honor narasumber, dan perjalanan dinas.

2. Sub. Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB

anggaran sebesar Rp. 33.790.000,- realisasi sebesar Rp. 33.272.000,- atau 98,47%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan seperti pembelian ATK, makan minum rapat, sewa mebel, dan perjalanan dinas dalam kota.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

anggaran sebesar Rp. 1.794.460.000,- realisasi sebesar Rp. 772.533.000,- atau 43,05%. Pada tahun 2022

1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)

anggaran sebesar Rp. 603.000.000,- realisasi sebesar Rp. 572.000.000,- atau 94,86%. Pada tahun 2022

2. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran sebesar Rp. 1.077.060.000,- realisasi sebesar Rp. 87.470.000,- atau 8,12%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian atk,mamkan minum kantor,perjalanan dians biasa dan dalam kota.
3. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran sebesar Rp. 114.400.000,- realisasi sebesar Rp. 113.063.000,- atau 98,83%. Pada tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-bidang yang berada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB untuk tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja Persentase Rasio Akseptor KB telah berhasil tercapai sebesar 71,85% dari target yang ditetapkan 85,88%, sehingga persentase realisasi capaian tersebut yaitu 83,66%.
2. Pencapaian indikator Nilai SAKIP OPD saat ini belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) sehingga masih menggunakan data capaian tahun sebelumnya (2021) yaitu bernilai “ BB “. Sedangkan nilai SAKIP OPD yang ditargetkan tahun ini yaitu nilai “ A “.

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan kedepannya. Pencapaian ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yaitu antara lain :

- Mempertahankan pencapaian indikator Nilai SAKIP OPD dari tahun kemarin yang minimal sama dengan pencapaian tahun kemarin.
- Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil.
- Dengan melakukan pemutakhiran data Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta Aktif (PA) di lapangan

- Dengan memanfaatkan inovasi yaitu aplikasi berbasis android (INTIP KONSEP) dalam memaksimalkan pelayanan kontrasepsi
- Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program KKBPK bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa
- Adanya bimbingan terpadu untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

Rumbia, Januari 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA,



Drs.H.ABDUL AZIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 199401 1 009

LAMPIRAN